

**ANALISIS FIQH SIYASAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
KEWENANGAN KPAI DALAM KASUS PEMBERHENTIAN
AUDISI PB DJARUM**

SKRIPSI

Oleh:

Tegar Himawan Muhammad

NIM. C95216148



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tegar Himawan Muhammad
NIM : C95216148
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah dan UU No.35 Tentang
Perlindungan Anak Terhadap Kewenangan KPAI
dalam Kasus Pemberhentian Audisi PB Djarum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2020

Saya Menyatakan,



Tegar Himawan Muhammad
NIM. C95216148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tegar Himawan Muhamamd Nim C95216148 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Februari 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Khubby Ali Rohmad', is placed over a light blue rectangular background.

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI

NIP.1978092020091110009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tegar Himawan Muhammad ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 21 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI
NIP. 1978092020091110009

Penguji II,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707272296031002

Penguji III,



Sukamto, SH., MS.
NIP. 1960031219993031002

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 21 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA



PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tegar Himawan Muhammad
NIM : C95216148
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Tata Negara
E-mail address : Tegarhimawan91@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS FIQH SIYASAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEWENANGAN KPPI DALAM KASUS PEMBERHENTIAN AUDISI PB DJARUM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2021
Penulis

(Tegar Himawan Muhammad)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis	11
2. Secara Praktis.....	11
G. Definisi Operasional	11
1. Fiqh siyasah	12
2. Kewenangan.....	12
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia	12
4. PB Djarum	12
H. Metode Penelitian	12
I. Jenis Penelitian.....	13
1. Bahan Hukum	14
2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3. Teknik Analisis Data	15
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP MASHALIH AL-DAULAH DALAM FIQH SIYASAH	17

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Sad	S}	Es (dengan titik di bawah)

- Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, sedangkan diawal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan suatu pun, misalnya an-Nisa>.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memili perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap anak dapat dilihat mulai dari konstitusi negara yaitu dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 2 bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, sebagai implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara 1945 serta prinsip-prinsip dasar dalam konvensi hak-hak anak yaitu prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak.

³ M. Nashir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 27.

Undang-Undang tentang perlindungan anak ini disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002, dan dirubah pada tahun 2014.

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak;
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

[illegible]

Akhir-akhir ini marak diberitakan terjadinya polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan PB Djarum. Polemik tersebut bermula dari tuduhan Komisioner KPAI bidang Kesehatan dan NAPZA, Sitty Hikmawatty, menyatakan, kegiatan audisi beasiswa bulu tangkis Djarum Foundation termasuk dalam bentuk eksploitasi anak terselubung. Sitty menyatakan, kegiatan yang melibatkan anak-anak dan disponsori oleh industri rokok merupakan termasuk bentuk eksploitasi anak secara terselubung. Kala itu KPAI lantas meminta Djarum Foundation untuk segera menghentikan kegiatan audisi yang masih akan dilaksanakan di beberapa kota selain Bandung. KPAI menilai Djarum Foundation telah memanfaatkan anak-anak untuk mempromosikan brand image Djarum dalam kegiatan audisi bulutangkis. Hal itu telah disepakati pula oleh sejumlah lembaga negara lain seperti Kemenko PMK, Kemenpora, Kemenkes, Bappenas, dan BPOM sesuai pertemuan di kantor KPAI.⁵

⁵ Ikang Maulana, “KPAI Vs Pb Djarum” (<https://www.kompasiana.com/ikangmaulana5589/5d792ef90d8230535136ede2/kpai-vs-pb-djarum-memang-ada-masalah-apa?page=all>, Diakses pada 10 November 2019)

⁸ Ibid, Hal 25.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dalam Aspek Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
2. Untuk Menganalisis dalam Aspek UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kasus pemberhentian audisi PB Djarum.

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

[illegible]

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam rangka memberikan pengaturan terkait Tentang kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna menentukan arah kebijakan yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yang ada di masa yang akan datang atau yang telah ada. Sesuai dengan apa yang telah di cita-citakan dan menjadikan masyarakat lebih terjamin hak-hak kemanusiannya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas:

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Kegiatan metode ini berupa memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai norma hukum positif. Memaparkan berarti menguraikan asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan norma hukum, menganalisis berarti memberi bimbingan atau pegangan teoritikal terhadap pembentuk dan penegakan hukum dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan permasalahan norma, mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum ke dalam beberapa cabang hukum yang ada dalam suatu sistem hukum; menginterpretasi adalah tindakan untuk memberi sifat tafsir terhadap norma yang sedang berlaku, apakah dalam penerapannya telah sesuai dengan arti, makna dan tujuan dirumuskannya norma tersebut, menilai berarti mencocokkan apakah norma yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum sebagai dasar dari semua dasar hukum. Dalam metode penelitian normatif memuat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

I. Jenis Penelitian

¹⁴ Chalid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Hal 1.

[illegible]

peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.¹⁶

1. Bahan Hukum

Yang dimaksud dengan bahan hukum dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan isu hukum mengenai apa yang sedang diteliti diperlukan bahan-bahan penelitian. Bahan-bahan penelitian hukum dibedakan menjadi dua yakni berupa bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam hal ini juga meliputi Ijtihad para ulama sebagai mashadir hukum dalam ajaran Islam, dan sumber hukum positif yaitu UUD 1945. Sedangkan Al-Qur'an dan Hadist menjadi Sumber Hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia maupun kamus

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal 199.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), Hal 181.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan Teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknis analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan secara umum kajian Fiqh Siyasah hukum Islam dan untuk selanjutnya dipakai untuk menganalisis kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk diketahui kesimpulannya.

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima

bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I berisikan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berisikan teori-teori konsep hukum tata Negara Islam (Fiqh Siyasah) yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dalam siyasah dusturiyah dalam sub bab Lembaga Mashalih Al-Daulah.

Bab III memuat tentang data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh penulis dari berbagai sumber yang berkaitan tentang kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan uraian kasus pemberhentian audisi PB Djarum.

Bab IV berisikan jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II. Pada bab ini nantinya berisikan dua jawaban, yakni yang pertama jawaban mengenai bagaimana Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kedua, bagaimana Analisis UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap kewenangan KPAI dalam Pemberhentian Audisi PB Djarum.

Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

KONSEP MASHALIH AL-DAULAH DALAM FIQH SIYASAH

⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), Hal 26.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*

Imam al-Mawardi, ahli *fiqh* Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwsannya ruang lingkup *Fiqh Siyasah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), politik moneter (*Siyasah Maliyah*), politik peradilan (*Siyasah Qadla'iyah*), politik peperangan (*Siyasah Harbiyah*), dan politik administrasi (*Siyasah Idariyah*).

Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.⁷

1. *Siyasah Dusturiyyah*, yang mencakup tentang *siyasah tasri'iyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah*

⁷ Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: K.Ista, 2007), Hal 576.

2. *Siyasah Maliyyah* yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.⁹

Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.¹⁰

C. Konsep Lembaga Mashalih Al-Daulah

1. Pengertian Lembaga Mashalih Al-Daulah

Dalam Perspektif Etimologi kalimat Mashalih Al-Daulah merupakan bentuk jamak dari kalimat Maslahah yang berarti kebaikan-kebaikan, sedangkan Al-Daulah berarti Negara, dengan demikian lembaga Mashalih Al-Daulah dapat difahami sebagai lembaga yang bertugas dan berfungsi untuk kemaslahatan Negara yang dalam istilah Ketatanegaraannya secara teknis dan spesifik teraktualisasikan dalam Departemen-departemen yang mengurus dan mewadahi tugas-tugas negara secara keadministrasian.¹¹

Argumentasi faktual sebagai legitimasi Lembaga Mashalih Al-Daulah ini adalah perbuatan (*af'al*) Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, dalam

⁸ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasaah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014) , Hal 44.

⁹ Ibid, Hal 45.

¹⁰ Ibid, Hal 45.

¹¹ M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press), Hal 113.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

Dalam sejarah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan tugas kepada para sahabat untuk urusan-urusan yang terkait dengan keadministrasian negara seperti Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit yang diberi tugas untuk mencatat dan menulis berbagai hal yang terkait dengan Administrasi Kenegaraan, dan dalam masalah pencatatan pemasukan negara Rasulullah menugaskan diantaranya :

- [illegible]

- ## 2. Perkembangan Lembaga Mashalih Al-Daulah

Untuk kelancaran pekerjaan pemerintah, dibentuk lembaga administrasi negara. Seperti diwanul kitabah, yang membawahi bidang-bidang seperti, katib al-rasail (sekretaris bidang keuangan), katib jund (sekretaris bidang militer),

[illegible]

katib al-syuhtah (sekretaris bidang kepolisian), dan katib al-qadhi (sekretaris bidang kehakiman).¹³

3. Pembentukan Kelembagaan Negara dan Pemerintah Islam

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, para Khalifah tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sekaligus berfungsi sebagai pemimpin agama. Hal tersebut disebabkan karena mereka semua adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang menguasai ilmu agama dan ilmu pemerintahan. Setiap persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat, selalu diselesaikan dengan cepat, tanpa menunggu adanya lembaga yang menangani masalah-masalah tersebut. Biasanya, para Khulafaur Rasyidin selalu mengajak diskusi para sahabat untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, terjadi perubahan dalam ketatanegaraan dan kelembagaan negara.

Setelah Mu'awiyah bin Abi Sufyan menjadi Khalifah, ada usaha perbaikan sistem kelembagaan negara yang dibentuk. Bentuk kelembagaan negara yang dibentuknya adalah : Khalifah, Ahlul Halli Wal Aqdi, dan Qadli Al-Qudalat. Ketiga lembaga ini memiliki tugas, fungsi dan wewenang berbeda. Pembentukan kelembagaan negara ini sebenarnya bertujuan untuk membantu Mu'awiyah di dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun pembagian kelembagaan tersebut secara teknis tugas dan fungsinya sebagai berikut :

¹³ M. Hasan Ubaidillah, *Kelembagaan Pemerintahan Islam*, (Surabaya: UINSA Press), Hal 114

Sementara Ahlul Halli Wal Aqdi, adalah para anggota dewan, seperti parlemen sekarang. Mereka yang duduk di kelembagaan ini terdiri dari para pakar atau para ahli di bidang masing-masing yang dibutuhkan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan kajian atas berbagai persoalan yang di hadapi pemerintah, dan mencari solusi terbaik untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pemerintah: seperti masalah sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta masalah-masalah lain. Hasil kajian mereka kemudian dijadikan rumusan sebagai bahan pembuatan kebijakan pemerintah dinasti Bani Umayyah.¹⁴

Apapun hasil temuan dan rumusan mereka, keputusan terakhir ada di tangan Khalifah. Khalifah lah yang menentukan apakah hasil temuan dan rumusan mereka akan diterima atau ditolak. Itulah sistem monarki absolute yang diberlakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Pembentukan dan

[illegible]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketiga lembaga tersebut telah memiliki tugas, fungsi dan wewenang sendiri di dalam menjalankan program-program kelebagaannya. Tetapi, apapun hasil dan konsep yang dibuat oleh masing-masing lembaga, keputusan terakhir tetap berada di tangan Khalifah. Keberadaan lembaga-lembaga ini hanya untuk membantu pemerintah dinasti Bani Umayyah untuk membantu meringankan pekerjaan Khalifah dan jajarannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

[illegible]

4. Pembentukan Tata Usaha Negara (Al-Nidhami Al-Idary)

Selain terjadi perkembangan dalam bidang politik seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah juga terjadi perkembangan dalam bidang ketata usahaan negara (Al-Nidhami A-Idary). Lembaga ini diperlukan untuk mengatur sistem pemerintahan negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau wilayah. Lembaga tata usaha negara ini membawahi beberapa departemen, seperti :

- a. Departemen Perpajakan (Diwanul Kharraj), departemen ini bertugas mengatur dan mengelola administrasi pajak tanah di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan dinasti Bani Umayyah.
 - b. Departemen Pos dan Perhubungan (Diwanul Rasail), departemen ini bertugas menyampaikan berita atau informasi dan surat-surat dari dan ke daerah-daerah kekuasaan dinasti Bani Umayyah.
 - c. Departemen Pekerjaan Umum (Diwanul Musytaghillat), departemen ini bertugas menangani berbagai kepentingan umum masyarakat.
 - d. Departemen Kearsipan (Diwanul Khatim), departemen ini bertugas menyimpan berbagai dokumen penting negara yang telah selesai diproses.
- Lembaga ini sangat penting, selain karena menyimpan arsip-arsip, juga mengurus surat-menyurat Khalifah, menyiarkannya, menyetempel dengan cara dibungkus kain, kemudian dibalut dengan lilin, kemudian distempel pada bagian atasnya.

Dalam perkembangannya, pemerintahan Daulah Abbasiyah juga membentuk lembaga-lembaga yang dapat melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lembaga ini disebut dengan istilah

Untuk menjalankan roda pemerintahan di masing-masing provinsi, diangkat seorang gubernur jenderal, yaitu amir al-umara. Mereka inilah yang menjadi penanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan di masing-masing provinsi yang berada di bawah kekuasaan Khalifah di pemerintah pusat.¹⁶

[illegible]

BAB III

PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

A. Sejarah KPAI

Dasar pembentukan Lembaga Negara di Indonesia terbagi pada tiga macam, pertama, berdasarkan UUNRI 1945, seperti; Komisi Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kementrian dan lain-lain. Kedua, lembaga negara yang berdasarkan atas perintah Undang-Undang, seperti; Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Yudisial dan lain-lain. Ketiga, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan di bawah Undang-Undang.

Lembaga negara yang berdasarkan perintah UU itu adalah lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah. Adapun latar belakang dibentuknya Lembaga Independen adalah, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Tugas Lembaga Independen ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari campur tangan politik. Adanya lembaga untuk mengatur profesi-profesi, karena padat membuka lapangan pekerjaan baru. Adapun lembaga yang bersifat independen yang terbentuk atas perintah Undang-undang itu, salah satunya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.³

³ <https://www.kpai.go.id/profil>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.01 WIB

KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institution) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

[illegible]

C. Tujuan KPAI

- a. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam Perlindungan anak;
- b. Membangun sistem dan jejaring pengawasan Perlindungan anak;
- c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas Perlindungan anak;
- d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan Perlindungan anak;
- e. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
- f. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.⁹

D. Susunan Kepengurusan KPAI Tahun 2017-2022

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyusun kepengurusan untuk periode 2017-2022. Para pengurus sebelumnya telah menjalani proses seleksi di DPR dan diangkat oleh Presiden melalui Keppres No 77/P Tahun 2017.

⁹ Ibid, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 14.12 WIB

PB Djarum telah menelurkan sejumlah atlet berprestasi, seperti Kevin Sanjaya, Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad, Busi Santoso, Antonius Budi Ariantho, Liem Swie King, Hendra Setiawan, Yahya Adi Kumara, Yantoni Edy Saputra, Mohammad Ahsan, Melati Daeva Oktaviani, Praveen Jordan, Debby Susanto dan lain-lain. Kevin Sanjaya bergabung dengan PB Djarum pada 2007. Kevin merupakan atlet ganda putra yang berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon

[illegible]

F. Uraian Kasus Pemberhentian Audisi PB Djarum

Penjaringan bibit atlet muda melalui program Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis tahun ini awalnya dijadwalkan digelar di Bandung, Purwokerto, Surabaya, Solo Raya dan Kudus. Audisi ini untuk menjaring atlet bulu tangkis berbakat usia 11 dan 13 tahun. Kegiatan audisi itu dimulai di Bandung pada 28 Juli 2019. Namun, tiga hari sebelum audisi digelar, Yayasan Lentera Anak dan Smoke Free Bandung mendesak panitia acara tidak menjadikan

[illegible]

2. 26 Juli 2019

3. 29 Juli 2019

¹⁴ <https://tirto.id/kpai-vs-pb-djarum-asal-usul-polemik-audisi-umum-bulu-tangkis-ehKu>, diakses pada 19 Februari 2020 pukul 15.01 WIB

6. 4 September 2019

¹⁷ <https://tirto.id/kpai-vs-pb-djarum-asal-usul-polemik-audisi-umum-bulu-tangkis-ehKu>, diakses pada 19 Februari 2020 pukul 15.01 WIB

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENYELEWENGAN

KEWENANGAN KPAI DALAM KASUS PEMBERHENTIAN AUDISI PB

DJARUM

ANALISIS FIQH SIYASAH DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENYELEWENGAN

KEWENANGAN KPAI DALAM KASUS PEMBERHENTIAN AUDISI PB

DJARUM

A. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, Fiqh Siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Konsep Fiqh Siyasah yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan konsep Lembaga Mashalih Al-Daulah. Yang berarti Lembaga tinggi negara atau setingkat lembaga tinggi negara bisa disebut juga pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang pemerintahan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya menangani masalah-masalah yang terjadi terkait indikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia yang berupa hak asasi anak.

Dalam konteks ini, penulis menganalogikan Lembaga Mashalih Al-Daulah sebagai lembaga tinggi negara atau lembaga negara independen yang setingkat dengan lembaga negara yang ada di Indonesia dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menangani tentang hak asasi manusia berupa

Adapun Lembaga Mashalih Al-Daulah, maka otoritasnya amat lemah dan syarat-syaratnya sangat sedikit, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi otoritas imam (khalifah). Status Lembaga Mashalih Al-Daulah hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Ia mengerjakan apa yang diperintahkan umum (khalifah), merealisasikan apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, dan melaporkan kejadian-kejadian penting dan aktual kepada imam (khalifah), agar ia bisa menanganinya sesuai dengan petunjuknya.¹ Hal ini selaras dengan kewenangan KPAI, dimana KPAI tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, dan status KPAI hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. Dan apabila terdapat dugaan kasus pelanggaran perlindungan anak, maka KPAI bertugas sebagai mediator antara rakyat dan pejabat, dan hanya melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pasal 9 menjelaskan bahwa anggota KPAI diangkat dan

[illegible]

Berdasarkan pelaksana kekuasaan KPAI jika dikaitkan dengan Fiqh Siyasah adalah ketua dan wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota KPAI. KPAI mempunyai kelengkapan yang terdiri atas sidang paripurna dan subkomisi. Sidang paripurna merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang terdiri dari seluruh anggota KPAI. Sidang dapat menetapkan peraturan tata tertib, program kerja, mekanisme kerja, mengusulkan sidang paripurna kepada Presiden, memberhentikan anggota KPAI, memilih Sekretaris Jenderal, memilih serta menentukan Ketua dan Wakil Ketua KPAI dan mengajukan bakal calon Anggota KPAI.

[illegible]

Selain itu, secara sosiologis kita juga mengakui bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dan juga, secara biologis anak merupakan suatu tahapan dalam kehidupan yang pasti akan dilalui oleh setiap manusia.

³ Republik Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Alinea Ke-4

mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang tentang perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional. Khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang nantinya diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang tentang perlindungan anak melatakan

tidak diragukan lagi bahwa langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah yang sangat besar kepada masalah perlindungan anak. Pada saat itu, ratifikasi melalui Keppres tidak menunjukkan bahwa derajat keikutsertaan Indonesia itu rendah adanya, lagipula hal itu tidak melanggar ketentuan hukum nasional maupun internasional. Ratifikasi sebuah perjanjian internasional melalui Keppres adalah sama sahnya di mata Internasional dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia sehingga tidak lagi memerlukan pengesahan melalui pembuatan Undang-Undang.

Pada tahun 1990, Konvensi Hak anak yang isinya bersangkut jaminan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan anak dianggap sebagai wilayah eksekutif, sehingga keputusan untuk ikut serta di dalamnya adalah berada dalam wilayah kekuasaan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden. Hal ini baru diubah kemudian ketika Indonesia memiliki UU Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999, UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menekankan bahwa masalah-masalah hak asasi manusia hanya boleh diatur oleh Undang-Undang dan bukan peraturan dibawahnya, ditambah ratifikasi keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional terkait harus melewati prosedur pembuatan Undang-Undang.

Bagaimanapun, keikutsertaan Indonesia di tahun 1990 terhadap salah satu instrumen hak asasi manusia berskala universal, dalam hal ini mengenai hak anak, adalah titik sejarah yang sangat penting. Meskipun pada saat itu ada beberapa ketentuan Konvensi Hak anak yang direservasi Indonesia (dan nantinya dicabut pada tahun 2005), namun sebagian besar dari isinya disepakati untuk dilaksanakan. Tiga komponen penting yang harus dilakukan adalah menyesuaikan

Penjabaran isi konvensi hak anak dilakukan secara bertahap, salah satunya adalah penyesuaian usia anak yang dapat diproses hukum dan upaya memanusiakan pengadilan anak, sebagaimana diwujudkan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perkembangan tersebut memang dirasakan agak lambat, apalagi ternyata ada sejumlah isi ketentuan UU Pengadilan Anak yang dirasakan kurang sesuai dengan semangat Konvensi, namun itu sudah merupakan kemajuan besar.

⁶ Enny Rosyidah Badawi, *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010), Hal 2.

Keberadaan UU Perlindungan Anak inilah yang mencoba menjawab komponen-komponen keikutsertaan Negara peserta di dalam Konvensi Hak Anak. Tidak mengherankan bahwa selain upaya untuk mensinkronkan isi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai anak, UU ini pun mencoba memperjelas aturan-aturan yang berkaitan dengan penghormatan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk mengadopsi ketentuan mengenai usia dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang semula terdapat di dalam Konvensi Hak Anak. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan akan pemerintahan yang memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, dibentuklah di dalamnya sebuah lembaga Negara independen untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan perlindungan anak demi efektifitas pencapaiannya.

Dan untuk inilah lembaga seperti KPAI dibentuk. Pada tataran kebijakan, yang dilakukan KPAI pada bagian besarnya memang memiliki persinggungan dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah sendiri melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara pada tataran teknis, KPAI mau tidak mau ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan yang termasuk lingkup perlindungan anak, yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan instansi Negara atau pemerintah lainnya seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, penanganan masalah sosial, hukum dan lainnya termasuk juga dalam bidang ketenagakerjaan, catatan sipil dan bidang-bidang spesifik lainnya.

Akibat adanya titik persinggungan itulah, baik dari sisi perlindungan anak secara langsung di lapangan, aspek pembuatan kebijakan, maupun juga dengan fungsi yang hampir serupa yang dijalankan oleh unit internal di masing-masing instansi terkait dengan pengawasan demi mengefektifkan penyelenggaraan

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka perlu diingat bahwa KPAI bukanlah polisi atau jaksa, apalagi hakim yang langsung menjatuhkan hukuman dan mengeksekusinya. KPAI bukan pula eksekutif yang melaksanakan langsung kegiatan-kegiatan lapangan terkait penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI dibentuk dalam rangka menyeimbangkan komponen pemerintahan yang baik, yang berfungsi menjalankan pengawasan kepada penyelenggara Negara agar tindakannya sejalan dengan prinsip-prinsip yang disepakati mengenai perlindungan anak, yang apabila tidak diindahkan akan dilanjutkan dengan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebagai penanggung jawab keseluruhan pelaksanaan penyelenggara Negara di lapangan.

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;

[illegible]

Dalam konteks ini KPAI menampung adanya keluhan, laporan atau pengaduan masyarakat, untuk kemudian meneliti permasalahan yang diadukan masyarakat tersebut, apakah merupakan pelanggaran ketentuan perlindungan anak atau tidak, termasuk untuk mengujinya supaya bisa membuat rekomendasi penyelesaiannya. KPAI kemudian bisa menyalurkan kasus tersebut ke lembaga penanganan yang tepat sambil membuat sebuah rekomendasi umum bagi pihak-pihak lainnya yang berwenang atau yang dirasa mampu mengatasi masalah-masalah yang diadukan tersebut. Dalam konteks ini rekomendasi atas pengaduan yang diterima adalah untuk memastikan bahwa institusi yang seharusnya berperan memang menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, dan pada sisi lain menemukan kerangka komprehensif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak serupa dalam lingkup yang lebih luas dan terpadu.

Hal ini dimaksudkan agar segala sesuatu tindakan yang dilakukan KPAI memenuhi kaidah akademis metodologis, sehingga apa yang dihasilkan juga mampu memberikan solusi yang terbaik dami pengefektifan penyelenggaraan perlindungan anak sehingga tidak berkesan sepihak atau hasil intuisi belaka. Dengan melakukan penelaahan ini diharapkan mampu memberikan kertas kerja yang memadai untuk sesuatu hal yang menuntut KPAI memberikan sikap

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa pada dasarnya KPAI tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan audisi PB Djarum, hal ini berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa kewenangan KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. KPAI sendiri bukanlah institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

¹⁰ <https://tirto.id/kpai-vs-pb-djarum-asal-usul-polemik-audisi-umum-bulu-tangkis-ehKu>, diakses pada 2 Maret 2020 pukul 15.56 WIB.

Dalam kasus KPAI dengan PB Djarum, KPAI hanya berhak melakukan penelaahan terhadap dugaan eksploitasi anak yang dilakukan oleh PB Djarum, melakukan mediasi terhadap kasus tersebut, dan apabila diperlukan KPAI dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang perlindungan anak. Dari sini dapat kita tarik

kesimpulan bahwa KPAI tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan audisi PB Djarum.

Bahkan sebelum membuat keputusan tersebut, KPAI harusnya melakukan klasifikasi tentang apa yang disebut dengan eksploitasi anak, karena pihak djarum pun yang diwakili oleh Budi Darmawan selaku Senior Manajer Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, telah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap PB Djarum dan PT Djarum, PB Djarum adalah klub Bulutangkis yang melakukan pembinaan sejak dini bagi atlet Bulutangkis Indonesia sejak tahun 1969, sedangkan PT Djarum adalah perusahaan rokok, yang tidak ada kaitannya dengan audisi tersebut.

Alangkah baiknya daripada membuat keputusan yang berada diluar kewenangannya, akan lebih baik apabila KPAI melakukan penelitian terhadap masalah ini terlebih dahulu, lalu mengadakan mediasi dengan pihak terkait, dan apabila mediasi tersebut tidak menemukan titik terang, maka KPAI dapat menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib untuk dibawa ke pengadilan dan membiarkan Hakim memutuskan penyelesaian terhadap perkara tersebut. Hal ini dikarenakan KPAI tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sebuah perkara. Metode yang sama juga digunakan oleh lembaga negara bantu lainnya seperti KPK dan Komnas HAM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai:

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebuah lembaga negara mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi tentang hak asasi manusia yang berupa hak asasi anak. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini adalah sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, maka kedudukannya (status) dalam struktur ketatanegaraan berada dalam lembaga yang membentuknya yakni Presiden dan DPR.
2. Dalam konteks kasus antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan PB Djarum, harusnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak berhak untuk menghentikan audiensi PB Djarum. Hal ini dikarenakan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia hanyalah sebatas mengawal dan mengawasi terhadap proses perlindungan anak yang ada di Indonesia. Alangkah baiknya apabila Komisi Perlindungan Anak Indonesia

B. Saran

[illegible]

Penulis juga berharap dengan hasil penelitian ini maka nantinya akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran bagi pembaca untuk lebih banya tau tentang lembaga negara bantu seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan penelitian terkait perlindungan anak yang nantinya semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam. 2016. Diterjemahkan: Fadli Bahri. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badawi, Enny Rosyidah. 2010. *Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Badri, Yatim. 2000. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djamil, M. Nashir. 2012. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli. 2003. *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Livinus, Sherly & Mety Rahmawati, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesiadalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan (studi kasus: penganiayaan anak adopsi di hotel Le Meriden Jakarta Pusat oleh CW)*. Jurnal Hukum.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Narbuko, Chalid. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pulungan, Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pulungan , J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putera, Rizky Pramustiko. 2012. *Analisis Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Skripsi
- Pulungan, Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN sunan ampel pres.
- Sajadzali, Munawir. 2011. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Pres.
- Soeidy, Sholeh. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit CV. Navindo Pustaka Mandiri.

